BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT MASALAH

1. Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah yang bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik ada karena kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan dibuat untuk memberikan solusi atas permasalahan publik yang terjadi.

Proses kebijakan publik dalam Winarno, B. (2016) yaitu:

a. Penyusunan agenda. Tahapan untuk memutuskan masalah apa yang terjadi di masyarakat dan menjadi perhatian pemerintah untuk dibuat sebuah kebijakan.
b. Formulasi kebijakan publik. Pada tahapan ini tidak semua yang ada dalam penyusunan agenda akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Tahapan ini akan menyeleksi permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa diselesaikan sekaligus.
c. Adopsi kebijakan. Tahapan pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah hukum tertulis yang akan menjadi sebuah pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan.
d. Implementasi kebijakan. Setelah melalui tahapan sebelumnya maka proses pelaksanaan kebijakan dapat dilaksanakan. Implementasi ini mengacu pada tindakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.
e. Evaluasi. Setelah implementasi tahapan selanjutnya adalah evaluasi yaitu memberikan penilain terhadap suatu kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi akan sulit dinilai apabila tujuan suatu

kebijakan tidak jelas. Adapun tujuan dan pentingnya evaluasi seperti menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, dan sebagai bahan masukan untuk kebijakan yang akan datang.

2. Implementasi kebijakan

Menurut Pramono, J., & Sos, S. (2022) implementasi adalah proses kegiatan dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai suatu hasil yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam proses kebijakan karena kebijakan yang telah dibuat akan bermanfaat apabila diimplementasikan. Sebuah program harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat bagaimana para pelaksana bukan sekedar mengetahui apa yang perlu mereka lakukan tetapi mempunyai pemahaman yang kompleks terhadap implementasi kebijakan.

3. Model Implementasi kebijakan

Menurut George C. Edward III ada 4 variabel yang menjadi kriteria penting dalam implementasi kebijakan, yaitu:

a. Komunikasi, menurut Edward III ada tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu, transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Pelaksana harus mengetahui apa yang sedang dilakukan. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Transmisi, sebelum dapat mengimplementasikan suatu keputusan, pelaksana harus tau bahwa keputusan tersebut telah dibuat dan adanya perintah

untuk melaksanakannya. Kejelasan, untuk melaksanakan suatu kebijakan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan harus diterima dan komunikasi kebijakan harus jelas. Konsistensi, perintah-perintah kepada pelaksana harus jelas dan konsisten.

b. Sumber Daya, perintah-perintah implementasi mungkin dapat diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten. Akan tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan maka akan menghambat dalam pelaksanaannya. Sumber daya seperti staf yang memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya, wewenang dan fasilitas yang dibutuhkan sebagai pendukung dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya personil yang terlatih akan menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan. Informasi menjadi salah satu sumber yang penting dalam implementasi kebijakan.
c. Disposisi. Sikap para pelaksana penting dalam proses implementasi kebijakan. Sikap baik yang dimiliki pelaksana terhadap suatu kebijakan berarti adanya dukungan yang memungkinkan mereka dapat melaksanakan kebijakan dengan baik. Sebaliknya jika para pelaksana tidak bersikap baik maka akan mengalami kesulitan.
d. Struktur Birokrasi. Struktur organisasi adalah salah satu badan yang akan sering bahkan secara menyeluruh menjadi pelaksana kebijakan. Dalam rangka memecahkan permasalahan sosial. Para pelaksana kebijakan tidak hanya berasal dari kalangan pemerintahan tetapi ada organisasi-organisasi swasta atau bahkan dibentuk suatu struktur baru untuk pelaksanaan kebijakan.

4. Peran Pemerintah

Salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan adalah pemerintah. Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arahan dalam penyelenggaraan pembangunan melalui peraturan. Pemerintah sebagai dinamisator adalah penggerak partisipasi masyarakat untuk menghindari masalah yang akan timbul dengan cara memberikan pengarahan secara intensif. Pemerintah sebagai fasilitator adalah menciptakan situasi yang dapat mendukung pelaksanaan melalui pendampingan kepada masyarakat.

5. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana adalah salah satu solusi yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir suatu dampak yang dihasilkan akibat bencana. Bencana tidak dapat dicegah, tapi dapat dikendalikan dan meminimalisir dampak yang akan diakibatkan. Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana:

> mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Dalam UU No.24 Tahun 2007 pasal 47 ayat (2) tentang penanggulangan bencana yaitu kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin c dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Pendidikan tentang penanggulangan bencana perlu diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan mengenai bencana. Penyuluhan bencana kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan

kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Penyelenggaraanya dapat dilakukan dengan cara mengadakan pertemuan kepada masyarakat dan juga dapat menggunakan media sosial.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar (RTRW) Tahun 2015-2035 salah satu kecamatan di Kota Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya ditetapkan sebagai zona lindung dengan fungsi kawasan resapan air dimana kegiatan budidaya yang dilakukan harus memenuhi syarat dan tidak boleh mengurangi daya serap tanah terhadap air sebagai kawasan lindung. Namun pada kenyataannya pembangunan yang terjadi justru semakin pesat dan seolah tidak memperhatikan fungsinya sebagai daerah resapan air. Dalam perencanaan tata ruang, dirancang untuk mengatur penggunaan lahan dan tata ruang kota, termasuk area resapan air dan daerah aliran sungai. Aturan ini juga berfungsi sebagai landasan dalam mengendalikan pembangunan yang ada di Kota Makassar. Dengan aturan yang jelas, pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa pembangunan tidak terjadi secara sembarangan.

Mitigasi dalam bencana banjir terbagi menjadi 2 macam, yaitu mitigasi secara struktural dan mitigasi secara nonstruktural. Mitigasi secara Struktural adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalisir bencana dengan melakukan pembangunan kanal khusus untuk mencegah banjir dan dengan membuat rekayasa teknis bangunan tahan bencana, serta infrastruktur bangunan yang tahan air. Sedangkan Mitigasi nonstruktural adalah upaya yang dilakukan selain mitigasi struktural seperti dengan perencanaan wilayah dan asuransi. Dalam mitigasi nonstruktural ini sangat mengharapkan dari perkembangan teknologi yang semakin maju. Harapannya adalah teknologi yang dapat memprediksi, mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya suatu bencana.

Adapun tahapan-tahapan Mitigasi Bencana Banjir:

a. Mitigasi sebelum terjadi banjir. Tahapan yang meliputi kegiatan dilakukan sebelum bencana terjadi. Mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir. Mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal dan cara-cara melindungi rumah, mengetahui saluran ataupun jalur yang sering dilalui banjir. Melakukan persiapan evakuasi apabila diperlukan. Mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan kepada anggota keluarga dan kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga. Membuat persiapan untuk hidup mandiri seperti menyiapkan makan, minum serta tas siaga bencana. Menyimpan berbagai dokumen penting. Dan memperhatikan aliran listrik yang bisa memicu bahaya apabila bersentuhan dengan air.
b. Mitigasi ketika sedang terjadi banjir. Simak informasi dari berbagai media mengenai informasi banjir untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Segara evakuasi apabila air di tempat tinggal meninggi. Waspada terhadap arus bawah, saluran air, dan tempat yang tergenang air. Jangan mengemudikan kendaraan di wilayah banjir. Waspada terhadap tempat melintasnya air yang kemungkinan akan dilalui arus deras.
c. Mitigasi setelah banjir. Menghindari air yang bergerak, hindari lokasi yang masih terkena bencana, hindari air banjir karena memungkinkan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersetrum. Waspada dengan instalasi listrik. Hindari are-area yang airnya baru surut.

B. TINJAUAN PUSTAKA TERKAIT KARYA

1. Definisi *Policy Brief*

Policy brief adalah dokumen singkat yang berisi informasi dan rekomendasi yang jelas tentang suatu isu tertentu. Informasi dan

rekomendasi yang diberikan berisi apa permasalahannya, bagaimana situasinya, siapa saja yang terdampak dan siapa saja yang harus menyelesaikannya. Dengan tujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan.

2. Tujuan *Policy Brief*

Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan. Tujuan umumnya adalah untuk mendukung proses pembuatan kebijakan yang berdasarkan informasi yang relevan. Adapun tujuan utamanya yaitu sebagai media untuk eksplorasi dan advokasi.

3. Sistematika Penulisan *Policy Brief*

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 dan Peraturan LAN Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Bagi Analis Kebijakan, telah diuraikan beberapa komponen yang ada dalam penyusunan *policy brief* yaitu sebagai berikut:

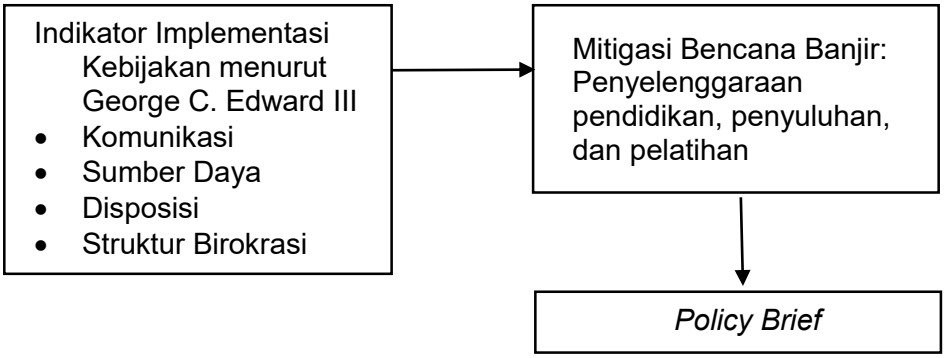
a. Judul
   1) Menarik sehingga pembaca menjadi ingin mengetahui lebih lanjut.
   2) Memunculkan minat pembaca.
   3) Singkat dan jelas mewakili substansi isi tulisan.
b. Ringkasan eksekutif (*executive summary*)
   1) Terdapat faktor-faktor yang menjadi akar masalahnya.
   2) Mengapa masalah tersebut perlu/strategis.
   3) Bagaimana solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
   4) Siapa yang menjadi subjek dalam menyelesaikan masalah tersebut.
c. Pendahuluan
   1) Terdiri dari beberapa kalimat ringkas akan tetapi menarik minat untuk membaca keseluruhan.
   2) Mengungkapkan urgensi dari topik yang diangkat.
d. Deskripsi masalah
   1) Spesifik langsung ke inti permasalahan.
   2) Terukur disertai bukti-bukti yang memadai (*evidence-based)*
   3) Analisis (apa, dimana, siapa, mengapa, dampak/efek).
e. Rekomendasi
   1) Spesifik memberikan solusi terhadap permasalahan yang diangkat.

2) Terukur, dalam arti solusi yang ditawarkan sesuai dengan kemampuan pemangku kepentingan (*stakeholder)* serta didukung oleh faktor-faktor yang ada.
3) Apendiks (jika diperlukan).
4) Referensi utama.

C. KERANGKA PIKIR

Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penulis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

Gambar 1
Kerangka Pikir



Sumber: Peneliti/George C Edward

1. Definisi Operasional

a. Komunikasi

Suatu kebijakan dapat terlaksana apabila informasi yang disampaikan jelas antara para pelaksana. Komunikasi yang jelas sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan tepat. Para pelaksana harus memiliki kemampuan dan kapasitas untuk melakukan komunikasi yang efektif.

b. Sumber Daya

Mitigasi banjir memerlukan dukungan berupa sumber daya yang memadai. Sumber daya manusia yang berpengalaman, terlatih dan siap siaga akan membantu meningkatkan efektivitas. Anggaran yang memadai akan membantu meningkatkan efektivitas dalam implementasi

kebijakan dan sistem informasi yang terintegrasi serta data dan informasi yang akurat juga sangat membantu efektivitas implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi ini dilihat dari sikap dan komitmen para pelaksana dan berbagai pihak yang terkait. Mereka harus memiliki sikap yang positif, harus memiliki komitmen yang kuat serta terlibat aktif dalam melaksanakan implementasi kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur yang jelas dan efektif dapat membantu dalam memastikan keputusan dan instruksi yang disampaikan tepat dan efektif. Hal ini akan mempermudah pembagian tugas dan fungsi yang jelas serta dapat membantu memastikan bahwa setiap unit memiliki perannya masing-masing. Dan membantu memastikan koordinasi dan kolaborasi antar unit berjalan dengan baik.